

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 2 NOMOR 1 - JUNI 2023

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

RIZANA

<i>Penegakan Hukum dan Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....</i>	1-9
--	-----

ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila di Indonesia.....</i>	10-14
--	-------

ADE PRATIWI SUSANTY

<i>Penyelesaian Sengketa Kredit Macet antara Bank Syariah dan Nasabah Debitur di Pengadilan.....</i>	15-22
--	-------

SANDRA DEWI, HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Penyelesaian Kredit Macet terhadap Debitur pada Bank Perkreditan Rakyat.....</i>	23-37
---	-------

RAI IQSANDRI

<i>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....</i>	38-43
--	-------

**URGENSI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
PANCASILA DI INDONESIA**

ANDREW SHANDY UTAMA

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
andrewshandyutama@unilak.ac.id

ABSTRACT

The character of Pancasila is an attitude that originates from the noble values of God, human values, values of unity, values of deliberation, and values of justice. The character of Pancasila is the original identity of the Indonesian people which has been passed down from generation to generation. This study aims to explain the urgency of strengthening Pancasila character education in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. One way to preserve the noble values of Pancasila is through education, starting from basic education, secondary education, to higher education. Strengthening the noble values of Pancasila through Pancasila Character Education is divided into four phases, namely Pancasila socialization, community self-awareness, conveying and inviting others, and the formation of Pancasila character. Pancasila character education is the only option that must be implemented in order to strengthen the noble values of Pancasila in the midst of a storm of moral degradation of the Indonesian people. However, the biggest challenge in implementing Pancasila Character Education is the political will of those in power who are comfortable with a corrupt system.

Keywords: Pancasila Education, Strengthening, Urgency

ABSTRAK

Karakter Pancasila adalah suatu sikap yang bersumber dari nilai-nilai luhur ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Karakter Pancasila merupakan identitas asli bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi penguatan pendidikan karakter Pancasila di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah melalui pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila melalui Pendidikan Karakter Pancasila terbagi dalam empat fase, yaitu sosialisasi Pancasila, kesadaran diri masyarakat, penyampaian dan ajakan kepada orang lain, serta terbentuknya karakter Pancasila. Pendidikan karakter Pancasila merupakan opsi tunggal yang harus diimplementasikan dalam rangka penguatan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah badai degradasi moral bangsa Indonesia. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi Pendidikan Karakter Pancasila adalah political will para penguasa yang sudah nyaman dengan sistem yang corrupt.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila, Penguatan, Urgensi

PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai pedoman yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara harfiah, Pancasila artinya lima dasar. Kelima dasar tersebut kemudian dituangkan dalam pembukaan konstitusi negara, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain Pancasila, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga disebutkan bahwa terdapat empat tujuan didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, di usia 70-an tahun sejak

Published by

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keempat tujuan tersebut seakan sulit dicapai. Salah satu penyebabnya adalah lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila yang telah diwariskan oleh The Founding Fathers. Sejak meletusnya Era Reformasi pada tahun 1998, bangsa Indonesia mulai mengalami degradasi moral. Para pemimpin yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat tanpa rasa malu melakukan korupsi.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi penguatan pendidikan karakter Pancasila di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakter Pancasila adalah suatu sikap yang bersumber dari nilai-nilai luhur ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Karakter Pancasila merupakan identitas asli bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh The Founding Fathers. Salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah melalui pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila mendapatkan tempat yang sangat terhormat sebagai dasar negara. Pemerintah menetapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran wajib mulai dari

pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sosialisasi mengenai nilai-nilai luhur Pancasila kepada masyarakat melalui program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat menandakan dimulainya era baru dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia. Era baru tersebut dikenal dengan nama Era Reformasi. Berbagai kebijakan Presiden Soeharto dihapus, termasuk dihapusnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kemudian diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun 2004, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) saja. Dalam acara konferensi nasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2020 di Jakarta, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa dampak dari dihapusnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1998 dahulu mulai

dirasakan pada saat sekarang ini, yaitu menyebabkan generasi muda bangsa Indonesia seolah kehilangan jati diri. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia berharap melalui program Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila kepada masyarakat.

Pendidikan karakter Pancasila merupakan opsi tunggal yang harus diimplementasikan dalam rangka penguatan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah badai degradasi moral bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Republik Indonesia harus segera merevisi kurikulum pendidikan dan menjadikan Pendidikan Karakter Pancasila sebagai mata pelajaran wajib mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila melalui Pendidikan Karakter Pancasila terbagi dalam empat fase. Pertama, sosialisasi nilai-nilai luhur Pancasila melalui berbagai media yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Fase pertama ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo sempat

menggaungkan perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang selalu ditayangkan melalui siaran televisi nasional.

Setelah disosialisasikan melalui berbagai media, pemerintah berharap ada orang-orang yang mulai menyadari jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Fase kedua Pendidikan Karakter Pancasila adalah penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nilai ketuhanan misalnya seorang muslim rajin mengerjakan ibadah sholat di masjid.

Apabila nilai-nilai luhur Pancasila sudah tercermin dalam perbuatannya sehari-hari, maka orang tersebut akan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Fase ketiga Pendidikan Karakter Pancasila adalah menyampaikan nilai-nilai luhur Pancasila kepada orang lain dan mengajak untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fase ketiga tidak efektif jika seseorang belum melewati fase kedua. Kecenderungan masyarakat adalah mengikuti ajakan dari orang yang dianggapnya baik, apalagi jika dianggap teladan bagi masyarakat.

Fase terakhir dari Pendidikan Karakter Pancasila adalah terbentuknya karakter Pancasila sebagai benteng yang

kokoh di dalam diri seseorang setelah mampu melewati fase kedua dan fase ketiga sebagai rangkaian proses dari pendidikan. Begitulah pentingnya Pendidikan Karakter Pancasila. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi Pendidikan Karakter Pancasila adalah political will para penguasa yang sudah nyaman dengan sistem yang corrupt.

KESIMPULAN

Karakter Pancasila adalah suatu sikap yang bersumber dari nilai-nilai luhur ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Karakter Pancasila merupakan identitas asli bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah melalui pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila melalui Pendidikan Karakter Pancasila terbagi dalam empat fase, yaitu sosialisasi Pancasila, kesadaran diri masyarakat, penyampaian dan ajakan kepada orang lain, serta terbentuknya karakter Pancasila. Pendidikan karakter Pancasila merupakan opsi tunggal yang harus diimplementasikan dalam rangka

penguatan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah badai degradasi moral bangsa Indonesia. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi Pendidikan Karakter Pancasila adalah political will para penguasa yang sudah nyaman dengan sistem yang corrupt.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021. Hal. 107-112.
- Chairiyah. "Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Pendidikan Karakter". *Jurnal Trihayu*, Volume 1, Nomor 1, 2014. Hal. 54-62.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. "Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi". *Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, Volume 13, Nomor 2, 2018. Hal. 17-36.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.